

EVALUASI RENCANA
KERJA (RENJA)

2022



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN



RINGKASAN EKSEKUTIF



Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan.

Pelaksanaan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 diarahkan pada perwujudan pelaksanaan program yang tercantum pada Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, dan indikator kinerja utamanya.

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 memuat 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1). Tersedianya Peluang Kerja Yang Didukung Oleh Kualitas Tenaga Kerja; 2). Meningkatnya Hubungan Industrial Yang Harmonis Serta Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3). Tersedianya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Transparan.

Untuk tahun 2022 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mendapat alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 20.788.866.250,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Emas Ketekagerjaan sebesar Rp 17.896.143.073,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau 85,12 persen. Tidak terserapnya anggaran keceburuhan antara lain adanya efisiensi, tidak terlaksananya pelatihan alat berat, seni antara KPS dan DPA, serta beberapa item belanja yang tidak terealisasi.

Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 3 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.549.043.660,- (sebelas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.864.018.895,- (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 85,25 persen;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp 318.554.000,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 224.904.165,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 70,60 persen;
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp 4.244.889.880,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.307.805.025,- (tiga milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima ribu dua puluh lima rupiah) atau sebesar 77,92 persen;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp 3.366.889.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam

juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.050.042.646,- (tiga milyar lima puluh juta empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 90,05 persen; dan

5. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 6 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.239.495.200,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.149.372.242,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau sebesar 89,13 persen.

Makassar, Januari 2023
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar



NIELMA PALAMBA, SH, M.AP
Pangkat : Pembina Utama Madya/IVa
NIP. : 19651210 199112 2 006

DAFTAR ISI

PINGRASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I: PENDAHULUAN	01
1.1 Latar Belakang	01
1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan	02
BAB II: PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR	18
BAB III: CAPAIAN TARGET KINERJA & PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR	28
3.1. Pengendalian Pelaksanaan Perja Perangkat Daerah	29
3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	37
3.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah	61
3.4. Evaluasi Terhadap Hasil Capaian Program Strategis RPJMD Kota Makassar	67
BAB IV: KENDALA YANG DIHADAPI	75
BAB V: PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022	08
Tabel 1.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Meja Tahun 2023	12
Tabel 2.1	Perbandingan antara Program/ Kegiatan dalam Renja dan Penstra Dinas Ketenagakerjaan TA. 2022	19
Tabel 2.2	Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan antara Renja Tahun 2022 dan Penstra Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	27
Tabel 3.1	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	30
Tabel 3.2	Fakta-Fakta Capaian Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022	38
Tabel 3.3	Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019	56
Tabel 3.4	Formulir E.51 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan	49
Tabel 3.5	Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019	45
Tabel 3.4	Formulir E.51 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan	57
Tabel 3.5	Formulir E.50 Evaluasi Terhadap Hasil Penstra Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan	61
Tabel 3.6	Capaian Program Strategis 10.000 Skill Training Gratis Periode 2021-2022	67
Tabel 3.7	Capaian Program Strategis Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Pekerja Kerja Dan Pekerja Baru Periode 2021-2022	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaklumkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 sebagaimana telah diubah pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan pada Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2863 /050.13/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali

Kota Makassar Nomor 1864/050.13/Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Evaluasi Rencana Kerja pada Tahun 2022 didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar pada Tahun 2022.

Sesuai dengan uraian-uraian di atas itulah pada kesempatan ini dilakukan evaluasi terhadap program kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur.

1.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan

Untuk adanya ketertarikan pandang dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan bidang ketenagakerjaan dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan dengan menjaga prinsip akuntabilitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

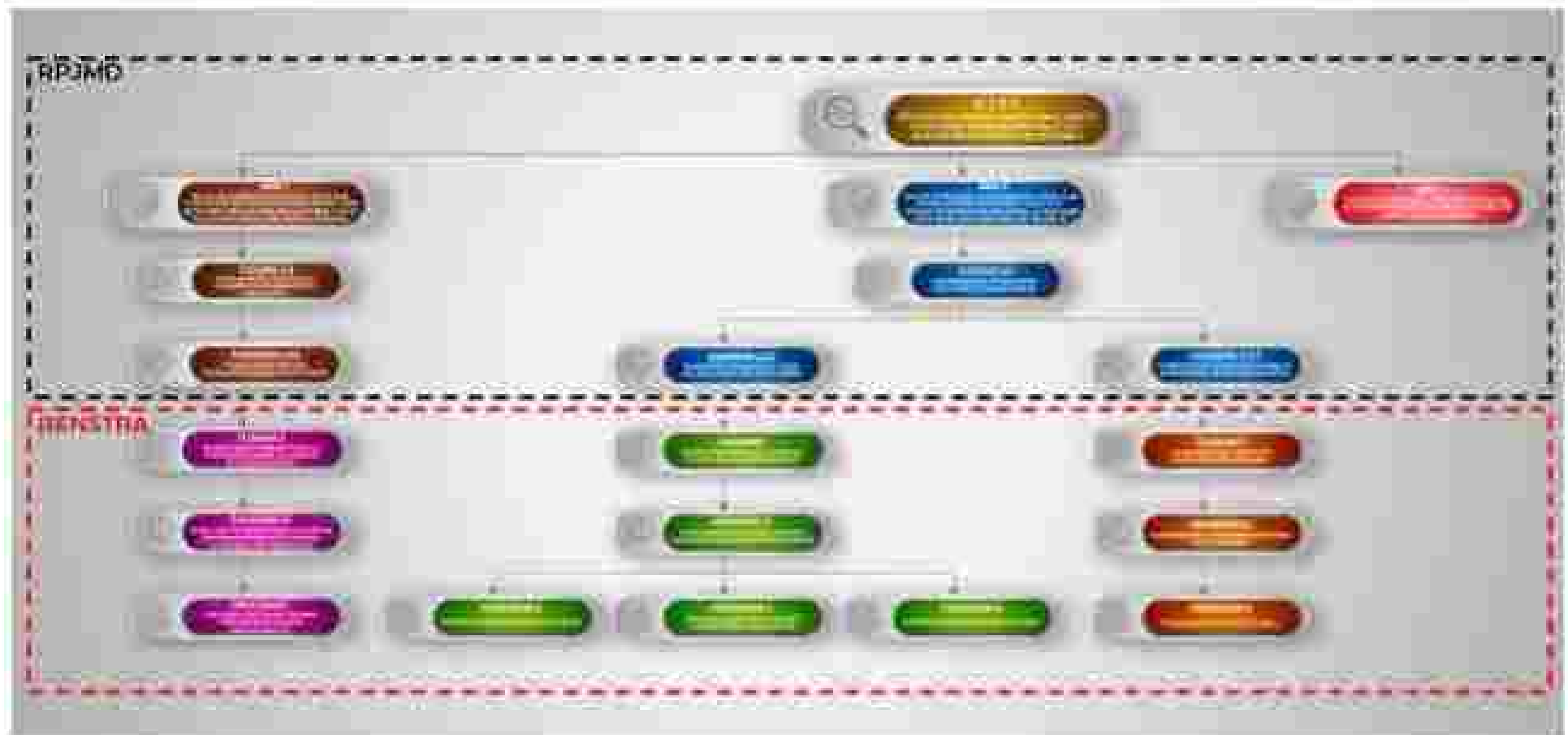
Dalam upaya mewujudkan visi Kota Makassar Tahun 2022-2026 *"Percepatan Menujudkan Makassar Kota Dunia yang Sumbere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua"*, dengan 3 (tiga) misi Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.

2. Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kalaf dunia yang "sombere" dan smart" city untuk semua.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan dimana untuk non urusan sesuai dengan misi pertama (1) "Perchusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dan Indeks Korupsi", pada tujuan 1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif pada sasaran 1.2.2 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. Sedangkan untuk urusan tenaga kerja sesuai dengan misi kedua (2) Kota Makassar "Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua", pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru serta pada sasaran 2.2.2. Tercapainya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi. Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sebagaimana teruang pada bagan berikut:

GAMBAR 1
CASCADING KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN RUTA MAKASSAR



Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menetapkan beberapa kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang layak di sektor formal dan perhubungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
2. Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif dan remuneratif perhubungan kesempatan kerja di sektor informal;
3. Pengembangan jejaring informasi pasar kerja untuk mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja;
4. Pembudayaan usaha mandiri, pembinaan padat karya produktif dan pengensian teknologi tepat guna (TTG) untuk mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor informal;
5. Peningkatan keterampilan, kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing;
6. Memberikan pelayanan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
7. Memberikan pemahaman tentang Peraturan Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pekerja;
8. Merajutikan sistem pengupahan yang adil;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi;
10. Peningkatan program perlindungan sosial bagi pekerja/buruh.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urutan wajib yang dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SIPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar;
2. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026, dan
3. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

1. Pencapaian SDGs dalam pembangunan berkelanjutan
2. Pengentasan pengangguran;
3. Pencapaian target Sasaran 2 (dua) pada RKPD Tahun 2008-2028 Kota Makassar;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan ini merupakan langkah teknis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan kebutuhannya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Langkah strategis itu mulai dari melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam program ini, peserta

pelatihan tidak hanya berasal dari pemberi kerja baru akan tetapi juga berasal dari tenaga kerja yang terkena PHK akibat Covid-19. Selain itu dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pemagangan dan sertifikasi profesi/kompetensi.

Langkah strategis ke 2 (dua) melalui Program Penempatan Tenaga Kerja melalui pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dimana dampak negatif Covid-19 di bidang ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dan pekerjanya di sektor formal. Namun juga dirasakan oleh pekerja di sektor informal seperti buruh bebas maupun pekerja mandiri.

Langkah strategi ketiga Dinas Ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial telah melakukan pendataan terutama perusahaan yang terdampak serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK, pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja sehingga di perlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan, membuka layanan informasi, konsultasi dan pengaduan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 dan meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Pengurusan program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Tingkat Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tingkat Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Tingkat Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	59,52%	Terselenggaranya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Basis kecempungan kerja terhadap pemenuhan usia 18 tahun ke atas	59,52%	Program Pemasaran Tenaga Kerja	Persentase Kapasitas Yang Didukung Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	59,52%
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Berampilhat Kompetensi	21,00%
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%		Jumlah Pekerja Pelatihan SKK	1.050
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%		Training Credit Skill	0orang
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%	Program Pemasaran Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Didukung Melalui Mekanisme Layanan Antar Kota Dalam Wilayah Kota Makassar	21,00%
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%		Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	2.500 Peluang Kerja

Memperkuat Hubungan Industrial yang Berkualitas	Angka Saigkera Perusahaan Pekerja Perempuan	4,31%	Memperkuat Kelembutan Tenaga Kerja	Uyul rata-rata per Jam Pekerja	8,19 (21)	Program Hubungan Industrial	Perentase Perusahaan Yang Melakukan Test Kritis Kerja Yang Layak	25,24%
							Angka Saigkera Perusahaan Pekerja Perempuan	4,31%
							Perentase Kerja Yang Didominasi Dengan Perempuan	65,00%
							Berbasis IP	
Memperkuat Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48,00%	Terdapatnya Administrasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	64,00%	Program Penguatng Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Perentase Berasita Dan Prosesnya Aparatur Dalam Kantor Baru	50,00%
				Indeks Akuntabilitas Kinerja (BAP)	A		Perentase Keberhasilan Layanan Keunggulan Dan Layanan Inovasi Perangkat Daerah	100,00%
							Perentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50,00%

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022/ direncanakan dalam 3 Program, 20 kegiatan dan 60 sub kegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu insentif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022, adalah Rp.20.758.866.290,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
4. Rincian kegiatan sesuai dengan rancangan awal RPJPD Tahun 2022 Kota Makassar.

Adapun Rincian Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar adalah sesuai tabel 1.2 sesuai format T-C.33 berikut :

Tabel 1.1 (Format T-C 33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prioritas Madya Tahun 2023
Kota Malinau

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

Kode	Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rencana Anggaran			Kategori Kegiatan	Rencana Pelaksanaan (RPJMD) 2022 dan 2023		
					Uraian	Volume Rencana	Estimasi Biaya (Rp)		2022	2023	Volume Rencana
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
01				URAIAN PROGRAM/KEGIATAN YANG JANGKA PANJANG DIRUMAH KEBERSIHAN DAERAH							
01	01			URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA							
01	01	01		PROGRAM PENGUKUTAN URAIAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA	44%	11.200.000.000	44%		44%	11.200.000.000	
					44%				44%		
					44%				44%		
01	01	01	01	Program Pengukutan dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	871.000.000	100%		100%	871.000.000	
01	01	01	01	11. Program Pengukutan dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	871.000.000	100%		100%	871.000.000	
					100%				100%		
01	01	01	02	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	4.271.000	100%		100%	4.271.000	
01	01	01	03	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	4.000.000	100%		100%	4.000.000	
01	01	01	04	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	1.170.000	100%		100%	1.170.000	
01	01	01	05	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	4.000.000	100%		100%	4.000.000	
01	01	01	06	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	871.000.000	100%		100%	871.000.000	
					100%				100%		
					100%				100%		
01	01	01	07	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	4.000.000	100%		100%	4.000.000	
					100%				100%		
01	01	01	08	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	1.000.000.000	100%		100%	1.000.000.000	
01	01	01	09	Program dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	4.000.000	100%		100%	4.000.000	

No	Urut	Kode	Kategori	Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Kegiatan	2017 (Rp)		2018 (Rp)	
							Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
01	01	01	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	01.01	100.000.000	100.000.000	0	0
01	01	01	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	01.02	100.000.000	100.000.000	0	0
02	01	02	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	02.01	100.000.000	100.000.000	0	0
02	01	02	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	02.02	100.000.000	100.000.000	0	0
03	01	03	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	03.01	100.000.000	100.000.000	0	0
03	01	03	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	03.02	100.000.000	100.000.000	0	0
04	01	04	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	04.01	100.000.000	100.000.000	0	0
04	01	04	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	04.02	100.000.000	100.000.000	0	0
05	01	05	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	05.01	100.000.000	100.000.000	0	0
05	01	05	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	05.02	100.000.000	100.000.000	0	0
06	01	06	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	06.01	100.000.000	100.000.000	0	0
06	01	06	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	06.02	100.000.000	100.000.000	0	0
07	01	07	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	07.01	100.000.000	100.000.000	0	0
07	01	07	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	07.02	100.000.000	100.000.000	0	0
08	01	08	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	08.01	100.000.000	100.000.000	0	0
08	01	08	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	08.02	100.000.000	100.000.000	0	0
09	01	09	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	09.01	100.000.000	100.000.000	0	0
09	01	09	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	09.02	100.000.000	100.000.000	0	0
10	01	10	01	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.01	100.000.000	100.000.000	0	0
10	01	10	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten/ Kota	Untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.02	100.000.000	100.000.000	0	0

00	01	00	00	00	Perencanaan Yaitu/isi (isi) Ditujukan: (Kategori/ jenis Kegiatan) (Sifat/ sifat) (Tingkat/ level) (Waktu/ Waktu) (Lokasi/ Lokasi) (Masa/ masa) (No/ No)	Perencanaan Yaitu/isi (isi) Ditujukan: (Kategori/ jenis Kegiatan) (Sifat/ sifat) (Tingkat/ level) (Waktu/ Waktu) (Lokasi/ Lokasi) (Masa/ masa) (No/ No)	Perencanaan	1.000	22.222.222	1000		1.000	22.222.222
00	01	01	00	01	Perencanaan Yaitu/isi (isi) Ditujukan: (Kategori/ jenis Kegiatan) (Sifat/ sifat) (Tingkat/ level) (Waktu/ Waktu) (Lokasi/ Lokasi) (Masa/ masa) (No/ No)	Perencanaan Yaitu/isi (isi) Ditujukan: (Kategori/ jenis Kegiatan) (Sifat/ sifat) (Tingkat/ level) (Waktu/ Waktu) (Lokasi/ Lokasi) (Masa/ masa) (No/ No)	Perencanaan	1.000	22.222.222	1000		1.000	22.222.222
00	01	00	00	00	Perencanaan Yaitu/isi (isi) Ditujukan: (Kategori/ jenis Kegiatan) (Sifat/ sifat) (Tingkat/ level) (Waktu/ Waktu) (Lokasi/ Lokasi) (Masa/ masa) (No/ No)	Perencanaan Yaitu/isi (isi) Ditujukan: (Kategori/ jenis Kegiatan) (Sifat/ sifat) (Tingkat/ level) (Waktu/ Waktu) (Lokasi/ Lokasi) (Masa/ masa) (No/ No)	Perencanaan	1.000	22.222.222	1000		1.000	22.222.222
TOTAL PAGE PERENCANAAN									22.222.222			22.222.222	

BAB II

PERBANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DAN RENSTRA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2022 yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2022 untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun anggaran 2022 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 21 kegiatan dan membutuhkan dana sebesar Rp.20.755.866.290,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Adapun perbandingan program/kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

TABEL 2.1

**PERSANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN DALAM RENCANA DAN RENCANA
DINAS KETERAGAKILAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA BUDGET/KELOMPOK PROGRAM / KEGIATAN JAWABAN/DINAS/REKONSILIASI		RENCANA BUDGET DAN ANGGARAN BELANJA/KELOMPOK RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023		RENCANA BUDGET DAN ANGGARAN BELANJA/KELOMPOK RENCANA TAHUN ANGGARAN 2023		PERBANDINGAN			
		REKON	REKON	R	R	R	R	R%	R%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
00	LEMBAGAS SUKSES										
00	LEMBAGAS PEMERINTAHAN BIDANG TERANGGUNG SUKSES										
00	001								20.799.000.000		20.000.000.000
01	001	PROGRAM PENYULUHAN KELOMPOK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKSES		PERSYARAHAN SARUNG PAS PELAYANAN APARATUR DALAM KABUPATEN SUKSES	PERSYARAHAN SARUNG PAS PELAYANAN APARATUR DALAM KABUPATEN SUKSES	90%		90%			
				PERSYARAHAN KETERSEDIAAN LAYANAN KEKAWALAN DAS LAYANAN KAWALAN PERANGKAT DAERAH	PERSYARAHAN KETERSEDIAAN LAYANAN KEKAWALAN DAS LAYANAN KAWALAN PERANGKAT DAERAH	100%	11.948.000.000	100%	11.948.000.000		
				PERSYARAHAN ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG KEBERKAWALAN KAWALAN	PERSYARAHAN ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG KEBERKAWALAN KAWALAN	80%		80%			
00	001	01	001	01	01	Pelaksanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Dasar	2 Dibayar	975.000.000	2 Dibayar	975.000.000	
01	001	01	001	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Daerah	1 Dibayar	141.000.000	1 Dibayar	141.000.000	
2	001	02	001	02	02	Kemudahan dan Peningkatan Efisiensi 001-002	1 Dibayar	8.077.000	1 Dibayar	8.077.000	
01	001	02	001	02	02	Kemudahan dan Peningkatan Efisiensi Kabupaten 001- 002	1 Dibayar	8.000.000	1 Dibayar	8.000.000	
01	001	01	001	01	04	Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan 001-002	1 Dibayar	1.400.000	1 Dibayar	1.400.000	
01	001	01	001	01	08	Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan 001-002	1 Dibayar	8.000.000	1 Dibayar	8.000.000	
01	001	02	001	02	08	Kemudahan dan Peningkatan Efisiensi Daerah Kota dan Municipal Kabupaten SukSES	1 Dibayar 4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	10.040.000	1 Dibayar 4 Laporan 1 Laporan	10.040.000	
01	001	02	001	02	01	Dinas Kota Kabupaten Kabupaten	1 Dibayar 4 Laporan 1 Dibayar	8.077.000	1 Dibayar 4 Laporan 1 Dibayar	8.077.000	

02	0.07	01	0.01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	7.200.000.000	12 Laporan	7.240.000.000	
03	0.07	01	0.01	01	Pengadaan Jasa dan Pengantar JDI	Jumlah Pengadaan Jasa dan Pengantar JDI	Jumlah Pengadaan Jasa dan Pengantar JDI	01 Orang Tetap	8.700.000.000	01 Orang Tetap	1.000.000.000	
04	0.07	01	0.01	02	Pengadaan Administrasi Keuangan Tugastu	Jumlah Pengadaan Administrasi Keuangan	Jumlah Pengadaan Administrasi Keuangan	10 Orang Tetap	200.000.000	10 Orang Tetap	200.000.000	
05	0.07	01	0.01	03	Pengadaan Peralaksanaan dan Pengantar Tugastu	Jumlah Pelaksanaan dan Pengantar Tugastu Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan dan Pengantar Tugastu Perangkat Daerah	01 Orang Tetap	140.000.000	01 Orang Tetap	144.000.000	
06	0.07	01	0.01	04	Keuntungan dan Pengeluaran Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Keuntungan dan Pengeluaran Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Keuntungan dan Pengeluaran Laporan Keuangan Daerah	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	
08	0.07	04	0.01	00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	344.000.000	12 Laporan	344.000.000	
09	0.07	01	0.01	01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	22.400.000	12 Laporan	22.400.000	
10	0.07	01	0.01	02	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada APBD	Jumlah Pelaksanaan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada APBD	Jumlah Pelaksanaan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada APBD	12 Laporan	81.100.000	12 Laporan	81.100.000	
00	0.07	01	0.01	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	
01	0.07	01	0.01	01	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	94.000.000	12 Laporan	94.000.000	
02	0.07	01	0.01	02	Pengadaan dan Pengeluaran Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan dan Pengeluaran Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan dan Pengeluaran Administrasi Keuangan	12 Laporan	21.400.000	12 Laporan	21.400.000	
03	0.07	01	0.01	03	Pengadaan dan Pengeluaran Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan dan Pengeluaran Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan dan Pengeluaran Administrasi Keuangan	01 Orang Tetap	20.000.000	01 Orang Tetap	20.000.000	
04	0.07	01	0.01	04	Bantuan Sosial	Jumlah Bantuan Sosial	Jumlah Bantuan Sosial	01 Orang		01 Orang		
05	0.07	01	0.01	05	Administrasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	
06	0.07	01	0.01	06	Pengadaan Kelompok Usaha	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Kelompok Usaha	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Kelompok Usaha	01 Orang	10.000.000	01 Orang	10.000.000	
07	0.07	01	0.01	07	Pengadaan Peralaksanaan dan Pengantar Tugastu	Jumlah Pelaksanaan dan Pengantar Tugastu	Jumlah Pelaksanaan dan Pengantar Tugastu	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	
08	0.07	01	0.01	08	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Barang Milik Daerah	01 Orang	20.000.000	01 Orang	20.000.000	
09	0.07	01	0.01	09	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	
10	0.07	01	0.01	10	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	

01	0.01	01	01	01	Pembelian Jasa Perbaikan Bangunan Perumahan dan Fasilitas Pendidikan Berwujud Tetap atau Ketersediaan Tetap Lainnya	Jumlah Pembelian Jasa Perbaikan Bangunan Perumahan dan Fasilitas Pendidikan Berwujud Tetap Lainnya	Jumlah Pembelian Jasa Perbaikan Bangunan Perumahan dan Fasilitas Pendidikan Berwujud Tetap Lainnya	1.0%	20.45.000	1.0%	20.45.000			
04	0.01	01	0.01	04	04	Pembelian Jasa Perumahan Bangunan Perumahan, Fasilitas dan Perbaikan Bangunan Tetap Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembelian Jasa Perumahan Bangunan Perumahan, Fasilitas dan Perbaikan Bangunan Tetap Operasional Bangunan Perumahan Jumlah Pembelian Jasa Perumahan Bangunan Perumahan, Fasilitas dan Perbaikan Bangunan Tetap Operasional Lapangan	Jumlah Pembelian Jasa Perumahan Bangunan Perumahan Perumahan Jumlah Pembelian Jasa Perumahan Bangunan Perumahan, Fasilitas dan Perbaikan Bangunan Tetap Operasional Lapangan	1.0%	175.740.000	1.0%	175.740.000		
05	0.01	01	0.01	05	05	Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan	Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan	Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan Jumlah Pembelian Perawatan dan Reparasi Kendaraan	18.0%	28.800.000	18.0%	28.800.000		
06	0.01	01	0.01	06	06	Pembelian, Perbaikan, dan Penggantian Barang Inventur dan Berwujud Lainnya	Jumlah Pembelian, Perbaikan, dan Penggantian Barang Inventur dan Berwujud Lainnya	Jumlah Pembelian, Perbaikan, dan Penggantian Barang Inventur dan Berwujud Lainnya	1.000%	200.000.000	1.000%	200.000.000		
07	0.01	01			PROGRAM PERBENTARAN TERASA BELIA	PERBENTARAN BELIA TAN LAKSI MELAKSANAKAN LAKSI BERKUALITAS KE BERKUALITAS TERASA BELIA	PERBENTARAN BELIA TAN LAKSI MELAKSANAKAN LAKSI BERKUALITAS KE BERKUALITAS TERASA BELIA	0.00%	0.000.000.000	0.00%	0.000.000.000			
02	0.01	01	0.01	01	01	Pembelian Belanja Tenaga Kerja (TK)	Jumlah Pembelian Belanja Tenaga Kerja (TK)	Jumlah Pembelian Belanja Tenaga Kerja (TK)	2.000000%	220.000.000	2.000000%	220.000.000		
02	0.01	01	0.01	01	01	Pembelian Belanja Tenaga Kerja Tetap	Jumlah Pembelian Belanja Tenaga Kerja Tetap	Jumlah Pembelian Belanja Tenaga Kerja Tetap	1.000000%	220.000.000	1.000000%	220.000.000		
02	0.01	01	0.01	01	02	Pembelian Belanja Tenaga Kerja Tidak Tetap	Jumlah Pembelian Belanja Tenaga Kerja Tidak Tetap	Jumlah Pembelian Belanja Tenaga Kerja Tidak Tetap	1.000000%	0.000.000.000	1.000000%	0.000.000.000		
03	0.01	01			PROGRAM PELATIHAN BELIA DAN PENGALAMAN TERASA BELIA	PERBENTARAN BELIA TAN MELAKSANAKAN LAKSI BERKUALITAS KE BERKUALITAS TERASA BELIA	PERBENTARAN BELIA TAN MELAKSANAKAN LAKSI BERKUALITAS KE BERKUALITAS TERASA BELIA	0.00%	0.000.000.000	0.00%	0.000.000.000			
02	0.01	01	0.01	01	01	Pembelian Fasilitas Berwujud dan Tidak Berwujud	Jumlah Pembelian Fasilitas Berwujud dan Tidak Berwujud	Jumlah Pembelian Fasilitas Berwujud dan Tidak Berwujud	1.000000%	0.000.000.000	1.000000%	0.000.000.000		
02	0.01	01	0.01	01	02	Pembelian Fasilitas Berwujud	Jumlah Pembelian Fasilitas Berwujud	Jumlah Pembelian Fasilitas Berwujud	1.000000%	0.000.000.000	1.000000%	0.000.000.000		
02	0.01	01	0.01	01	03	Pembelian Fasilitas Tidak Berwujud	Jumlah Pembelian Fasilitas Tidak Berwujud	Jumlah Pembelian Fasilitas Tidak Berwujud	1.000000%	0.000.000.000	1.000000%	0.000.000.000		
02	0.01	01	0.01	01	04	Pembelian Fasilitas Berwujud dan Tidak Berwujud Lainnya	Jumlah Pembelian Fasilitas Berwujud dan Tidak Berwujud Lainnya	Jumlah Pembelian Fasilitas Berwujud dan Tidak Berwujud Lainnya	1.000000%	0.000.000.000	1.000000%	0.000.000.000		

					kegiatan serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	45 Orang		45 Orang			
						Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	45 Orang	172.000.000	45 Orang		172.000.000	
						Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	45 Orang		45 Orang			
						Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	45 Orang		45 Orang			
01	1.07	01	1.01	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80 unit	24.900.000	80 unit		24.900.000	
02	1.07	01	1.01	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Monitoring dan Binaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Monitoring dan Binaan Lembaga Pelatihan Kerja	12 laporan		12 laporan			
						Jumlah Peserta Belajar Lembaga Pelatihan Swasta	Jumlah Peserta Belajar Lembaga Pelatihan Swasta	3 Orang	60.000.000	3 Orang		60.000.000	
						Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Belajar Pegawai: Lembaga Pelatihan Kerja	80 Orang		80 Orang			
03	1.07	01	1.01	01	Pelatihan dan Pendidikan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pelajaran Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	Jumlah Pelajaran Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	12 laporan	138.000.000	12 laporan		138.000.000	
01	1.07	01	1.01	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan	12 laporan	138.000.000	12 laporan		138.000.000	
03	1.07	01	1.01	03	Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan (KIP)	110 Orang	662.000.000	110 Orang		662.000.000	
01	1.07	01	1.01	04	Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	80 Orang		80 Orang			
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	30 Orang		30 Orang			
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	30 Orang		30 Orang			
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	30 Orang		30 Orang			
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	30 Orang	402.000.000	30 Orang		402.000.000	
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	12 Laporan		12 Laporan			
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	1 Laporan		1 Laporan			
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	60 Orang		60 Orang			
						Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	Jumlah Peserta Kelembagaan (KIP)	1 unit		1 unit			
03	1.07	01	1.01	05	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	300 Orang	1.200.000.000	300 Orang		1.200.000.000	
01	1.07	01	1.01	01	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan		1.200.000.000	
						Jumlah Peserta Belajar Kategori: Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Belajar Kategori: Tenaga Kerja	400 Orang		400 Orang			

02	0.07	04	0.01	04		Pelaksanaan PFI (PFI) dan Pura Pembangunan di Daerah Kabupaten Rote	Jumlah Pekerja Sederajat Indonesia (PFI) yang mendapatkan pertanggung	Jumlah Pekerja Sederajat Indonesia (PFI) yang mendapatkan pertanggung	140 Orang	140 Orang	140.000.000		
03	0.07	04	0.01	04	01	Pembiayaan Pembangunan dan Kegiatan Lain-Lain Lainnya	Jumlah Pekerja Sederajat Kabupaten Rote yang Sederajat	Jumlah Pekerja Sederajat Kabupaten Rote yang Sederajat	100 Orang	100 Orang	100.000.000		
03	0.07	04	0.01	04	02	Pembiayaan Pura Sederajat	Jumlah Pekerja Sederajat PFI Pura Pembangunan	Jumlah Pekerja Sederajat PFI Pura Pembangunan	40 Orang	40 Orang	40.000.000		
03	0.07	02				PROGRAM MENDUKA	PERSENTASE PEMBAYARAN TAHO MENDUKA TATA KELOLA BERHA TANG LAYAN	PERSENTASE PEMBAYARAN TAHO MENDUKA TATA KELOLA BERHA TANG LAYAN	20,0%	20,0%	800.000.000		
						AKSI BANGUNTA	PERSENTASE PEMBAYARAN MENDUKA	PERSENTASE PEMBAYARAN MENDUKA	4,0%	4,0%	800.000.000		
						PERSENTASE KASUS TAHO	PERSENTASE KASUS TAHO	80,0%	80,0%				
03	0.07	01	0.01	01		Pengadaan Perawatan Perawatan dan Perawatan Fasilitas Kerja Bersama untuk Perawatan yang sangat penting dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Rota	Jumlah Pekerjaan Pengadaan Perawatan Perawatan dan Perawatan ROTE	Jumlah Pekerjaan Pengadaan Perawatan Perawatan dan Perawatan ROTE	12 Pekerjaan	12 Pekerjaan	240.000.000		
03	0.07	01	0.01	01	01	Pengadaan Perawatan Perawatan dan Perawatan	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	4 Pekerjaan	4 Pekerjaan	80.000.000		
							Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	80 Orang	80 Orang	16.000.000		
03	0.07	01	0.01	01	02	Pengadaan Perawatan Perawatan dan Perawatan	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	8 Pekerjaan	8 Pekerjaan	160.000.000		
							Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	80 Orang	80 Orang	16.000.000		
							Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	40 Orang	40 Orang	8.000.000		
03	0.07	01	0.01	01	03	Pengadaan Perawatan Perawatan dan Perawatan	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	10 Pekerjaan	10 Pekerjaan	200.000.000		
							Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	100 Pekerjaan	100 Pekerjaan	20.000.000		
							Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	Jumlah Pekerjaan Perawatan dan Perawatan di Kabupaten	80 Orang	80 Orang	16.000.000		

02	007	02	001	02		Pengadaan dan Penyelenggaraan Perbaikan Jaringan Industri, Ruang Kerja dan Fasilitas Perbaikan di Daerah Industri Kota	Jumlah Pengadaan, Pengadaan dan Penyelenggaraan Perbaikan Jaringan Industri	Jumlah Pengadaan, Pengadaan dan Penyelenggaraan Perbaikan Jaringan Industri	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000		
04	007	02	003	02	01	Pengadaan Peralatan Gedung, Industri, Magas, Toko, dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	1 Bulan		1 Bulan			
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	1 Bulan	100.000.000	1 Bulan	100.000.000		
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	10 Bulan		10 Bulan			
02	007	02	003	02	02	Pengadaan Peralatan Gedung Industri, Magas, Toko, dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000		
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	1 Bulan		1 Bulan			
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	10 Bulan		10 Bulan			
02	007	02	003	02	03	Pengadaan Peralatan Gedung Industri, Magas, Toko, dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000		
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	1 Bulan		1 Bulan			
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	10 Bulan		10 Bulan			
02	007	02	003	02	04	Pengadaan Peralatan Gedung Industri, Magas, Toko, dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000		
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	1 Bulan		1 Bulan			
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	10 Bulan		10 Bulan			
02	007	02	003	02	05	Pengadaan Peralatan Gedung Industri, Magas, Toko, dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	Jumlah Peralatan Gedung dan Toko-toko	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000		
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 1 (satu) meter	1 Bulan		1 Bulan			
						Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	Jumlah Peralatan yang Berada Berdamping pada ketinggian di 2 (dua) meter	10 Bulan		10 Bulan			

Dari tabel di atas terdapat perbedaan pagu anggaran antara Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.736.866.290,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah).

Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana dan tidak terlaksana antara Renja tahun 2022 dengan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Analisis Perbandingan Program dan Kegiatan
Antara Renja dan Rencana Strategis
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar TA.2022

NO.	URAIAN	RENJA	RENSTRA	CATATAN
1.	Program	3	3	Sesuai
2.	Kegiatan	20	20	Sesuai
3.	Sub Kegiatan	60	60	Sesuai
4.	Anggaran	20.736.866.290	18.052.000.000	Tidak Sesuai

BAB III

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 diadopsikan sebagai landasan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan.

Untuk mewujudkan "Ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya saing, harmonis dan sejahtera untuk semua", Dinas Ketenagakerjaan berupaya melaksanakannya dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selama tahun 2022, Dinas Ketenagakerjaan telah melaksanakan 5 program dengan 20 kegiatan dan 60 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp. 20.003.780.000,- (dua puluh milyar tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 15.011.511.510,- (delapan belas milyar sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 1.992.268.490,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Dalam pelaksanaan mengalami beberapa perubahan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 bertambah sebesar Rp. 785.086.290,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 3,92 persen menjadi Rp. 20.788.866.290,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Emas Ketenagakerjaan sebesar Rp 17.896.143.073,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau 85,12 persen. Tidak terserapnya anggaran keceburuhan antara lain adanya efisiensi, tidak terlaksananya pelatihan alat berat, seisi antara KPS dan DPA, serta beberapa item belanja yang tidak terealisasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara melakukan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 289) dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Pasal 301).

3.1. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pengendalian pelaksanaan Perja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, dilakukan melalui pemantauan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dan indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Perja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menggunakan Formula 2.75 sebagaimana teruang pada tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1 (FORMAT B.7E)
REKORDERIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN BENCANA ZEMBA PERANGKAT ELEKTRIK

Supervisor/Staff
 Koordinator/Staff
 Pembantu Koordinator/Staff
 Tim/Staff

2017/2018
 2018/2019
 2019/2020
 2020/2021

No	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori	2017/2018		2018/2019		Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori
							1	2	3	4				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														

Sl. No.	Code	Item Name	Quantity	Unit	Rate	Total	Remarks
110	101	101	1	1	101	101	
110	102	102	1	1	102	102	
110	103	103	1	1	103	103	
110	104	104	1	1	104	104	
110	105	105	1	1	105	105	
110	106	106	1	1	106	106	
110	107	107	1	1	107	107	
110	108	108	1	1	108	108	
110	109	109	1	1	109	109	
110	110	110	1	1	110	110	
110	111	111	1	1	111	111	
110	112	112	1	1	112	112	
110	113	113	1	1	113	113	
110	114	114	1	1	114	114	
110	115	115	1	1	115	115	
110	116	116	1	1	116	116	
110	117	117	1	1	117	117	
110	118	118	1	1	118	118	
110	119	119	1	1	119	119	
110	120	120	1	1	120	120	
110	121	121	1	1	121	121	
110	122	122	1	1	122	122	
110	123	123	1	1	123	123	
110	124	124	1	1	124	124	
110	125	125	1	1	125	125	
110	126	126	1	1	126	126	
110	127	127	1	1	127	127	
110	128	128	1	1	128	128	
110	129	129	1	1	129	129	
110	130	130	1	1	130	130	
110	131	131	1	1	131	131	
110	132	132	1	1	132	132	
110	133	133	1	1	133	133	
110	134	134	1	1	134	134	
110	135	135	1	1	135	135	
110	136	136	1	1	136	136	
110	137	137	1	1	137	137	
110	138	138	1	1	138	138	
110	139	139	1	1	139	139	
110	140	140	1	1	140	140	

Sl. No.	S. No.	Code	Project Name	Project Description	Project Start Date	Project End Date	Project Status	Project Budget	Project Actuals	Project Variance	Project Risk	Project Comments	Project Performance		Project Score	Project Rating	
													Target	Actual			
10	101	01	001	01	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
10	102	02	002	02	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002
10	103	03	003	03	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
10	104	04	004	04	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004
10	105	05	005	05	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005
10	106	06	006	06	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006
10	107	07	007	07	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007
10	108	08	008	08	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008
10	109	09	009	09	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009
10	110	10	010	10	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
10	111	11	011	11	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
10	112	12	012	12	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
10	113	13	013	13	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
10	114	14	014	14	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
10	115	15	015	15	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
10	116	16	016	16	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016
10	117	17	017	17	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017
10	118	18	018	18	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018
10	119	19	019	19	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019
10	120	20	020	20	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020
10	121	21	021	21	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021
10	122	22	022	22	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022
10	123	23	023	23	023	023	023	023	023	023	023	023	023	023	023	023	023
10	124	24	024	24	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024
10	125	25	025	25	025	025	025	025	025	025	025	025	025	025	025	025	025
10	126	26	026	26	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026
10	127	27	027	27	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027
10	128	28	028	28	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028
10	129	29	029	29	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029
10	130	30	030	30	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030

Dari hasil tabel di atas dari 60 (enam puluh) sub kegiatan terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan mengalami perbedaan pagu anggaran antara Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimana terjadi penambahan pagu anggaran pada saat pembahasan anggaran di DPRD Kota Makassar.

3.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada bidang ketenagakerjaan dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 direncanakan dalam 5 Program yang dijabarkan dalam 20 Kegiatan dan 60 subkegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan 14 Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total ketertutupan dana/pagu indikator yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2022 adalah Rp. 20.738.866.290,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah); dan
4. Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp 17.695.143.073,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau

85,12 persen. Tidak terserapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya efisiensi, tidak terlaksananya pelatihan alat berat, selisih antara RPS dan DPA, serta beberapa item belanja yang tidak terealisasi.

Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2022 kepeleuruhan capaian berimanya target tinggi (91% s 100%).

Adapun rata-rata capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2022

Program/Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Peningkat Daya Pemertintahan Daerah (Kategori) Kota			
Persentase Sarana Dan Peralatan Aparatur Dalam Kantor Baku	90,00%	90,42%	100,46%
Persentase Keterlaksanaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase ABM Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	88,28%	98,04%
Program Peningkatan Tenaga Kerja			
Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	91,00%	92,30%	99,77%
Program Pelatihan Kerja Dan Pemertintahan Tenaga Kerja			
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Mumpuni	0,50%	0,50%	100,00%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21,00%	20,58%	98,00%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.000 Orang	1.124 Orang	100,04%
Program Peningkatan Tenaga Kerja			
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Melaksanakan Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	95,00%		
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	6.200 peluang kerja		
Program Hubungan Industri			
Persentase Perusahaan Yang Menempatkan Para Kelala Kerja Yang Lulus	99,00%	98,62%	99,62%
Angka Sengketa Perusahaan-Pelajar/Pertahun	4,00%	4,67%	100,00%
Persentase Kasus Yang Dikeluarkan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	19,00%	21,00%	100,00%

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja	Sasaran Tahun 2021	Tahun 2022		
		TARGET	Realisasi	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	90%	90,41%	100,46%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	100,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	90%	69,25%	75,84%

Rata-rata capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 92,10 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

1. Dari target 90 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 90,41 persen atau dengan capaian sebesar 100,46 persen. Dimana dari 657 sarana dan prasarana aparatur lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 594 sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
2. Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen. Dimana dari 24 Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja telah disusun secara keseluruhan dan.
3. Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 69,25 persen atau dengan capaian sebesar 75,84 persen. Dimana dari 63 ASN lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 43 ASN mendapatkan peningkatan kapasitas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 3 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 11.349.043.560,- (sebelas milyar lima ratus empat puluh

sembilan juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.964.018.595,- (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 86,28 persen.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturinya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang diujam.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Artinya jangan ada "sebagi pilih" dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Oleh karena itulah, Dinas Ketenagakerjaan (dalam pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan profesionalitas pegawai terkait masalah attitude atau perilaku
2. Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis

3. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana; penyediaan fasilitas untuk disabilitas dan ruang laktasi; serta

4. Penyediaan sarana pengendalian.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.



Faktor Penghambat:

Dalam pelaksanaan pencapaian target / kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tahun 2022 ditraikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam rangka pemenuhan kebutuhan unit kerja.

Faktor Pendukung:

Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penguang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 diraitkan sebagai berikut :

1. Ketersediaan anggaran.
2. Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Tindak Lanjut:

Tindak Lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Perentase Realisasi Perencanaan Tenaga Kerja Yang Dimulai	99,87%	93,35%	99,33%	99,77%

Pada-Rata capaian kinerja program sebesar 99,77 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisis capaian program di atas sebagai berikut :

1. Dari target 93,35 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terrealisasi sebesar 93,35 persen atau dengan capaian sebesar 99,77 persen. Dimana dari 30 kegiatan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) terrealisasi sebanyak 28 kegiatan.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.318.554.000,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.224.924.165,- (dua ratus dua puluh empat juta

sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 70,60 persen.

Faktor Penghambat :

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2022 dirincikan sebagai berikut:

1. Masih minimnya kesadaran perusahaan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro.

Faktor Pendukung :

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2022 dirincikan sebagai berikut :

1. Telah tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar Tahun 2022-2026.
2. Terbentuknya Forum HRD.

Tindak Lanjut :

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

1. Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
2. Sosialisasi Kebijakan yang tertuang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar tahun 2022-2026.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	2021 Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Berprestasi Kompetensi	2,41	2,38%	2,55%	91,52%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	60%	21,00%	20,00%	83,46%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	453 Orang	1.060 Orang	1.124 Orang	106,04%

Rata-rata capaian kinerja program sebesar 97,51 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

1. Dari target 0,58 persen Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 0,53 persen atau dengan capaian sebesar 91,02 persen, dimana dari jumlah tenaga kerja sebesar 357.150 orang yang sebanyak 2.044 orang bersertifikat kompetensi;
2. Dari target 21 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 20,05 persen atau dengan capaian sebesar 95,48 persen, dimana nilai PDFB tahun 2022 sebesar 126.313 milyar rupiah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 629.933 jiwa; dan
3. Dari target 1.060 orang yang mendapatkan Pelatihan Skill Training Gratis terealisasi sebanyak 1.124 orang atau dengan capaian sebesar 105,04 persen.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp 4.244.883.880,- (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.307.805.025,- (tiga milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus lima ribu dua puluh lima rupiah) atau sebesar 77,92 persen.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini antara lain:

1. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
2. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan indikator tersebut antara lain adanya Program Strategis Wali Kota "10.000 Skill Training Gratis" dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pengembangan produktifitas. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia usaha. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di Jakarta, baik tes kompetensi, produktivitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja.

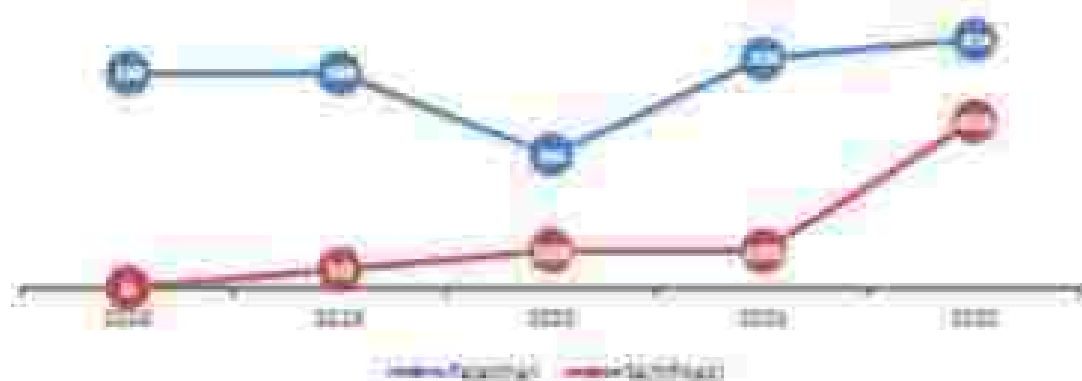


Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana Forum SDC bertujuan untuk menginspirasi pengangguran dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga menjangkau perusahaan industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan tenaga kerja. Selain itu adanya kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) terkait Job Start



(Perkembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi)



Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi tujuan kinerja ditahun berikutnya, akan akan lebih mendorong LPK (Swasta) bisnis untuk memiliki akreditasi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan dan mengirim ASN untuk mengikuti diidat Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

(Tindak Lanjut)

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi tujuan kinerja antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;
2. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kuncupuan pelatihan;
3. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
4. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna; dan
5. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Perentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	55,00%	55,00%	55,12%	100,22%
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Baruk Baru	-	8.200 Peluang Kerja	8.423 Peluang Kerja	102,84%

Rata-rata capaian kinerja program sebesar 100,33 persen atau kategori berkemera sangat tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

1. Dari target 55 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terrealisasi sebesar 55,12 persen atau dengan capaian sebesar 100,22 persen. Dimana dari 8.151 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 4.482 orang; dan

2. Dari target 3.200 Peluang Kerja Dan Peluang Usaha Baru terealisasi sebanyak 3.483 peluang kerja atau dengan capaian sebesar 103,43 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.366.869.550,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.050.042.646,- (tiga milyar lima puluh juta empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar 90,65 persen.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini antara lain :

- Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya FKS pejabat fungsional pengantar kerja (2 orang).
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal dan
- Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan capaian penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan pameran.



penyuluhan dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKI merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tambahan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Penempatan Tenaga Kerja



Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk siap bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki keprawaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu



Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu melalui peningkatan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya Forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana Forum SDC bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga mengajak perusahaan industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan tenaga kerja.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Laport Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1990 yang menyatakan "Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya". Selain itu akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	29,93%	29,84%	28,62%	95,90%
Angka Sengketa Perselisihan Pekerja/Pertahun	6,22%	4,81%	4,67%	103,01%
Persentase Kasus Yang Dipecahkan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	69,93%	69,00%	61,38%	89,16%

Rata-rata capaian kinerja program sebesar 95,96 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisis capaian program di atas sebagai berikut :

1. Dari target 29,84 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak terrealisasi sebesar 28,62 persen. Dimana dari 5.723 perusahaan di Kota Makassar sebanyak 1.509 perusahaan telah menerapkan tata Kelola yang layak.
2. Dari target 4,81 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun terrealisasi sebesar 4,67 persen atau dengan capaian sebesar 103,01 persen. Dimana dari 5.723 perusahaan di Kota Makassar terdapat 245 kasus yang dilaporkan. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya; dan
3. Dari target 69 Persen Kasus Hubungan Industrial Yang Dipecahkan Dengan Perjanjian Bersama (PB) terrealisasi sebesar 61,38 persen atau dengan capaian sebesar 89,96 persen. Dimana dari 245 kasus yang dilaporkan sebanyak 151 kasus dipecahkan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.289.495.200,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.149.572.242,- (satu

milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau sekitar 8,13 persen.

Hubungan industrial yang harmonis mendorong terciptanya ketenagaaan berusaha dan bekerja, peningkatan produkti dan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja. Hubungan industrial yang baik akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuannya. Peningkatan hubungan industrial juga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Yang tentunya ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Hubungan industrial yang kondusif akan mendorong terciptanya stabilitas di sektor kerja dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada keadaan tertentu kepentingan di antara keduanya dapat berbeda, hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, sarana sarana hubungan industrial sangat diperhatikan agar tercapai iklim kerja yang harmonis.

Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial melakukan pembinaan antara lain Serikat Pekerja/Serikat Buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasma bipartit, lembaga kerjasma tripartite, dan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Selain itu melakukan pendaftaran dan pemantauan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam menjamin kesejahteraan pekerja melakukan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penetapan Upah Minimum Kota (UME) melalui Dewan Pengupahan.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melanggar kewajibannya dan atau tidak memenuhinya haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi, maka penyelesaian perselisihan tersebut diimpahkan kepada mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan



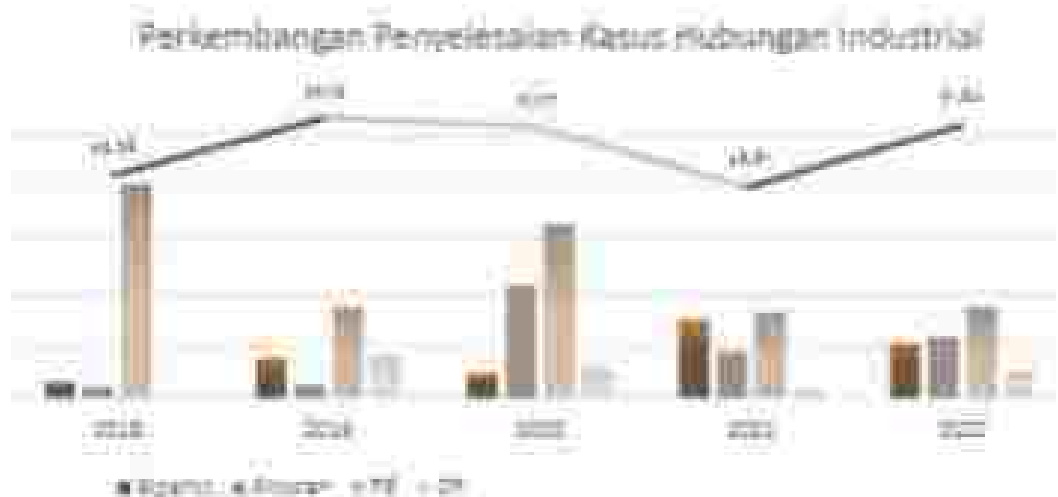
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan

sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar



Kasus sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2022 sebanyak 222 meningkat sebanyak 10 kasus dimana pada tahun 2021 tercatat sebanyak 212 kasus. Akan tetapi menurun dibandingkan pada tahun 2020 dimana tercatat kasus sengketa pengusaha-pekerja sebanyak sebanyak 326 kasus. Hal ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja yang terdampak Pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja.

Dari 2022 kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 212 kasus PHK, 4 kasus perselisihan hak dan 6 perselisihan kepentingan. Sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sebanyak 52 kasus diselesaikan secara bipartite, 55 secara arbitrase, 87 secara peradilan bersama dan 25 kasus masih dalam proses mediasi.



Faktor Penghambat :

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja masih tinggi.
2. Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial terjadi penungkutan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami penurunan, dan
3. Masih terbatasnya FNS perjabat fungsional mediator.

Faktor Pendukung :

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Terbentuknya LKS Tripartit yang setiap bulan melakukan rapat Kerja terkait isu-isu Ketenagakerjaan;
2. Terbentuknya Dewan Pengopahan.

Tindak Lanjut :

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

1. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
2. Penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

Selanjutnya target dan realisasi anggaran per program yang telah direvisi di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rincian Realisasi Anggaran Per Program
Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAI
1	Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.130.348.820	8.660.354.223	94,80%
2	Pencapaian Tenaga Kerja	46.850.000	43.697.600	93,26%
3	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.200.515.650	3.772.090.104	89,81%
4	Penempatan Tenaga Kerja	2.191.572.451	964.127.033	43,99%
5	Hubungan Industrial	635.291.200	604.263.778	95,12%
TOTAL		16.209.899.151	14.064.482.728	86,49%

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4 sesuai format Formulir Tabel E.31 di bawah ini :

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
12.1.2.1	12.1.2.1.1	12.1.2.1.1.1	12.1.2.1.1.2	12.1.2.1.1.3	12.1.2.1.1.4	12.1.2.1.1.5	12.1.2.1.1.6	12.1.2.1.1.7	12.1.2.1.1.8	12.1.2.1.1.9	12.1.2.1.1.10	12.1.2.1.1.11	12.1.2.1.1.12	12.1.2.1.1.13	12.1.2.1.1.14	12.1.2.1.1.15	12.1.2.1.1.16	12.1.2.1.1.17	12.1.2.1.1.18	12.1.2.1.1.19	12.1.2.1.1.20
12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1	12.1.2.1

No	Kategori	Sub Kategori	Nama Kegiatan	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022		2023		Total	Catatan	
							Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi					
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

No	Kategori	Uraian	Kategori	Kode	Saldo Awal	Saldo Akhir	Debit	Kredit	Periode												Saldo Akhir	Debit	Kredit																									
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																												
1	11	Akumulasi Penyusutan Gedung	Akumulasi Penyusutan	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
2	11	Akumulasi Penyusutan Mesin	Akumulasi Penyusutan	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
3	11	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor	Akumulasi Penyusutan	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
4	11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	Akumulasi Penyusutan	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
5	11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Transportasi	Akumulasi Penyusutan	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Total																							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3.3. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2022 sampai tahun 2026 beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2026.

Evaluasi Hasil Pencapaian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengetahui capaian realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target akhir periode (tahun 2026).

Jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, maka capaian rata-rata capaian program pada tahun 2022 adalah sebesar 88,14% atau dalam kategori tinggi.

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 sesuai format Formulir Tabel E.80 di bawah ini :

Kategori	Sub-kategori	Keterangan	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari		
Kategori A	Sub-kategori A	Keterangan A	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000		
		Keterangan B	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	
		Keterangan C	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	
		Keterangan D	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	
		Keterangan E	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	
		Keterangan F	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000
		Keterangan G	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000
		Keterangan H	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000
		Keterangan I	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000	9000000
		Keterangan J	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

Kategori	Sub-kategori	2017		2018		2019		2020		2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total																					
		Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value																																	
Kategori A	Sub-kategori 1	100	1000	150	1500	200	2000	250	2500	300	3000	350	3500	400	4000	450	4500	500	5000	550	5500	3500	35000																			
	Sub-kategori 2	120	1200	180	1800	240	2400	300	3000	360	3600	420	4200	480	4800	540	5400	600	6000	660	6600	4200	42000																			
	Sub-kategori 3	140	1400	210	2100	280	2800	350	3500	420	4200	490	4900	560	5600	630	6300	700	7000	770	7700	4900	49000																			
	Sub-kategori 4	160	1600	240	2400	320	3200	400	4000	480	4800	560	5600	640	6400	720	7200	800	8000	880	8800	5600	56000																			
	Sub-kategori 5	180	1800	270	2700	360	3600	450	4500	540	5400	630	6300	720	7200	810	8100	900	9000	990	9900	6300	63000																			
	Sub-kategori 6	200	2000	300	3000	400	4000	500	5000	600	6000	700	7000	800	8000	900	9000	1000	10000	1100	11000	7000	70000																			
	Sub-kategori 7	220	2200	330	3300	440	4400	550	5500	660	6600	770	7700	880	8800	990	9900	1100	11000	1210	12100	7700	77000																			
	Sub-kategori 8	240	2400	360	3600	480	4800	600	6000	720	7200	840	8400	960	9600	1080	10800	1200	12000	1320	13200	8400	84000																			
	Sub-kategori 9	260	2600	390	3900	520	5200	640	6400	760	7600	880	8800	1000	10000	1120	11200	1240	12400	1360	13600	9100	91000																			
	Sub-kategori 10	280	2800	420	4200	560	5600	700	7000	840	8400	980	9800	1120	11200	1260	12600	1400	14000	1540	15400	9800	98000																			
Total																					2800	28000	4200	42000	5600	56000	7000	70000	8400	84000	9800	98000	11200	112000	12600	126000	14000	140000	15400	154000	98000	980000

Keterangan:
 1. Volume: Jumlah unit
 2. Value: Nilai dalam juta Rupiah
 3. Total: Jumlah keseluruhan



INFORMASI LAINNYA: KONTAK DAN LAINNYA
 021-12345678 | 021-87654321
 021-9876543 | 021-43210987
 021-5432109 | 021-10987654
 021-6543210 | 021-21098765

3.4. Evaluasi Terhadap Hasil Capaian Program Strategis RPJMD Kota Makassar

Dalam mewujudkan "Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas dari Indeks Korupsi", implementasi dalam percepatan Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar "10.000 Skill Training Gratis" dengan didukung oleh 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Catatan Sipil.

Pada tahun 2022 di targetkan sebanyak 5.004 orang peserta skill training gratis dengan anggaran sebesar Rp. 14.421.248.330,- (empat belas milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Realisasi dari pelaksanaan skill training gratis sebanyak 4.933 orang atau dengan capaian sebesar 96,58 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.433.723.949,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Adapun rincian capaian dari masing-masing perangkat daerah sebagaimana tertuang pada table berikut:

Tabel 3.6
Capaian Program Strategis 10.000 Skill Training Gratis
Periode 2021-2022

NO	PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN TAHUN		TOTAL
		2021	2022	
1.	Dinas Ketenagakerjaan	685	1124	1809
2.	Dinas Perumahan	450	1795	2245
3.	Dinas Koperasi dan UKM	171	666	837
4.	Dinas Perdagangan	0	273	273
5.	Dinas Sosial	0	150	150
6.	Dinas Ketahanan Pangan	300	200	500

7	Dinas Pertanian dan Perikanan	0	78	78
8	Dinas Perhubungan dan Olahraga	450	450	900
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	0	0	0
10	Dinas Catatan Sipil	0	0	0
TOTAL		2.050	4.928	6.971

Selanjutnya dalam merujuk ke "Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua", implementasi dalam pencapaian Program Strategis Penyediaan Dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru dengan didukung oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Pemananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2022 di targetkan sebanyak 37.508 kemudahan akses peluang kerja/bisnis baru dengan anggaran sebesar Rp.24.832.397.880,- (dua puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Realisasi dari pelaksanaan kemudahan akses peluang kerja/bisnis baru sebanyak 44.785 kemudahan akses peluang kerja/bisnis atau dengan capaian sebesar 119,40 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.833.793.029,- (tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah).

Adapun rincian capaian dari masing-masing perangkat daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Capaian Program Strategis Penyediaan Dengan Kemudahan
Akses 100.000 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru
Periode 2021-2022

NO	PERANGKAT HASILAH	CAPAIAN TAHUN		TOTAL
		2021	2022	
1	Dinas Ketenagakerjaan	6035	2463	13608
2	Dinas Perikanan	450	3400	3870
3	Dinas Koperasi dan UKM	279	1872	2148
4	Dinas Perdagangan	0	1185	1185
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1050	1050
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2164	28775	30939
TOTAL		9245	44785	53030

Untuk lebih lengkapnya, Evaluasi Hasil Program Strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 dan table 3.9 berikut:

Kategorie		Beschreibung		Einheit	Wert	Einheit	Wert
Code	Text	Code	Text	Einheit	Wert	Einheit	Wert
Subtotal für direkte Kosten					20.000,00	€	20.000,00
01	01		Wagen- und Transportmittel für die Projektarbeiten	Stück	20.000,00	€	20.000,00
02	02	01	Projektarbeiten	Personenstunden	1.000,00	h	100.000,00
03	03	01	Projektdirektor/Projektmanager für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	100,00	h	10.000,00
04	04	01	Technischer Projektleiter/Projektmanager für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	50,00	h	5.000,00
05	05	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	30,00	h	3.000,00
06	06	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	20,00	h	2.000,00
07	07	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	10,00	h	1.000,00
08	08	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	5,00	h	500,00
09	09	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	5,00	h	500,00
10	10	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	5,00	h	500,00
11	11	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	5,00	h	500,00
12	12	01	Projektingenieur für den gesamten Zeitraum der Projektarbeiten	Personenstunden	5,00	h	500,00
Subtotal für indirekte Kosten					7.500,00	€	7.500,00
Gesamtsumme					27.500,00	€	27.500,00

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Realisasi anggaran dan kinerja program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berjalan sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan review terhadap program/kegiatan untuk perbaikan pada tahun berikutnya, baik dari faktor yang mendorong tercapainya kinerja program, faktor yang menghambat terlaksananya program/kegiatan maupun tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya hingga semua program/kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja dan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. Masih terbatasnya PNS Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
3. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal;
4. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal;
5. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pemberi kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja dan;
6. Meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan hubungan industrial akibat dampak Pandemi Covid-19.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya antara lain :

1. Akan membentuk regulasi tentang Wajib Laporan Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan "Setiap pengusaha atau pengguna wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya";
2. Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;
3. Mendorong swasta mengadakan atau membuat lembaga-lembaga pelatihan, menyiapkan standarisasi dan penerbitan sertifikat;
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
5. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
6. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP;
7. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi keifah-faiah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
8. Serta penamabahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022 yang berpedoman pada RPJPD Kota Makassar.

Dari alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.20.785.565.290,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi Rp.17.596.143.073,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau atau 85,12 persen persen dengan kategori serapan tinggi. Tidak terterapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya efisiensi, tidak terlaksananya pelatihan alat berat, selisi antara HPS dan DPA, serta beberapa item belanja yang tidak terealisasi.

Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2022 berkorelasi sangat tinggi (81% s.d 100%).

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021 dapat disimpulkan berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Program rata-rata Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022.

5.2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di tahun 2022 perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target-tujuan yang hendak dicapai dengan urusan yang terurus secara sinergi, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikutsertakan.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

Realisasi anggaran dan kinerja program Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berjalan sesuai program/kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan review terhadap program/kegiatan untuk perbaikan pada tahun berikutnya, baik dari faktor yang mendorong tercapainya kinerja program, faktor yang menghambat terlaksananya program/kegiatan maupun tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya hingga semua program/kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja program yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja dan Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. Masih terbatasnya PNS Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
3. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal;
4. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal;
5. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pemberi kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja dan;
6. Meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan hubungan industrial akibat dampak Pandemi Covid-19.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya antara lain :

1. Akan membentuk regulasi tentang Wajib Laporan Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan "Setiap pengusaha atau pengguna wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya";
2. Akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan Penempatan Tenaga kerja;
3. Mendorong swasta mengadakan atau membuat lembaga-lembaga pelatihan, menyiapkan standarisasi dan penerbitan sertifikat;
4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
5. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna;
6. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP;
7. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi keifah-fiah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
8. Serta penamabahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja dan Pejabat Fungsional Mediator.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022 yang berpedoman pada RPJPD Kota Makassar.

Dari alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp.20.785.565.290,- (dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi Rp.17.596.143.073,- (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau atau 85,12 persen persen dengan kategori serapan tinggi. Tidak terterapnya anggaran keseluruhan antara lain adanya efisiensi, tidak terlaksananya pelatihan alat berat, selisi antara HPS dan DPA, serta beberapa item belanja yang tidak terealisasi.

Realisasi capaian target kinerja 5 program tahun 2022 berkorelasi sangat tinggi (81% s.d 100%).

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2021 dapat disimpulkan berdasarkan analisis pencapaian Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Program rata-rata Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022.

5.2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di tahun 2022 perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja melalui koordinasi internal Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target-tujuan yang hendak dicapai dengan urusan yang tertusun secara sinergi, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
2. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan, pembinaan yang berkelanjutan, serta pemberian kesempatan pendidikan, guna peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
3. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikutsertakan.